

PENERAPAN PRINSIP *EX AEQUO ET BONO* OLEH MAJELIS ARBITRASE DALAM MEMUTUS SENGKETA KOMERSIAL

INTISARI

Oleh

Hengki M. Sibuea dan Sutanto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip *ex aequo et bono* tersebut oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam memutus sengketa komersial serta konsekwensi hukumnya apabila penerapan prinsip *ex aequo et bono* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penulisan hukum normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan analisis dan konstruksi data dilakukan secara deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, kebolehan arbiter ataupun majelis arbitrase dalam memutus sengketa komersial berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase, yang dibuat secara tertulis, telah memberi kuasa kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memutus sengketa di antara para pihak yang bersengketa berdasarkan pada kebijaksanaan atau berdasarkan pada keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya yang mengatur mengenai syarat-syarat yang tegas dan jelas atas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase dalam menerapkan prinsip *ex aequo et bono* tersebut. Kedua, konsekwensi hukum dari penerapan prinsip *ex aequo et bono* oleh arbiter atau majelis arbitrase bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut dapat dimohonkan pembatalan oleh pihak yang tidak puas kepada Pengadilan Negeri dan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase atau putusan majelis arbitrase yang didasarkan pada kesalahan penerapan prinsip *ex aequo et bono* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Ex Aequo Et Bono*, Perjanjian Arbitrase Pembatalan Putusan Arbitrase.

IMPLEMENTATION OF *EX AEQUO ET BONO* PRINCIPLE BY ARBITRATION TRIBUNAL IN STIPULATING THE COMMERCIAL DISPUTES

ABSTRACT

By

Hengki M. Sibuea and Sutanto

This research aims to reveal the implementation of *ex aequo et bono* principle by the arbitrator or arbitration tribunal including and its legal consequences if such principle implementation is contrary to the prevailing laws and regulations.

The research methods used by this Researcher are Normative Juridical and this research uses secondary data acquired from the literature review by studying the primary law, secondary law and tertiary law materials. Data collection and processing use qualitative approach, while the data analysis and construction use deductive approach.

From the research results may be summarized that, First, the authorization of arbitrator or arbitration tribunal in stipulating the commercial disputes subject to the *ex aequo et bono* principle in case of the parties who enter into an arbitration agreement, as drawn up in writing, have grant the power to the arbitrator or arbitration tribunal to stipulate on disputes between the parties based on the discretion and justice (*ex aequo et bono*) and it is deemed to improve the Law Number 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Disputes Resolution especially those that regulates concerning firmly and clearly terms of the implementing of the *ex aequo et bono* principle. Second, the legal consequence from implementing *ex aequo et bono* principle by arbitrator and arbitration tribunal if it is contrary to the prevailing laws and regulations, is the award which has been stipulated by such arbitrator or arbitration tribunal may be filed to the District Court by the unsatisfied party to be cancelled and it is deemed necessary to improve the Law Number 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution regarding the application of arbitrator or arbitration tribunale award cancellation based on the *ex aequo et bono* implementation contrary to the prevailing laws and regulations.

Keywords: Arbitration, Alternative Disputes Settlement, *Ex Aequo Et Bono*, Arbitration Agreement of Arbitral Award Cancellation.